

Dr. Jusan Hi. Yusuf, M.Si.
Dr. Rustam Hasim, M.Hum.

DINAMIKA POLITIK LOKAL PASCA PILGUB MALUKU UTARA 1999

*Sebuah Pendekatan Historik,
Konflik, dan Transformasi Kekuasaan*

Editor:
Dr. Irwan Abbas, M.Hum



DINAMIKA POLITIK LOKAL PASCA PILGUB MALUKU UTARA 1999

*Sebuah Pendekatan Historik,
Konflik, dan Transformasi Kekuasaan*

Dr. Jusan Hi. Yusuf, M.Si.
Dr. Rustam Hasim, M.Hum.

Editor:
Dr. Irwan Abbas, M.Hum

DINAMIKA POLITIK LOKAL PASCA PILGUB MALUKU UTARA 1999
Sebuah Pendekatan Historik, Konflik, dan Transformasi Kekuasaan

Tim Penulis:

Dr. Jusan Hi. Yusuf, M.Si
Dr. Rustam Hasim, M.Hum

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni

Editor:

Dr. Irwan Abbas, M.Hum

ISBN:

978-634-246-763-3

Cetakan Pertama:

Maret, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini merupakan sebuah upaya intelektual yang serius untuk membedah anatomi politik Maluku Utara pada periode krusial pasca-1999. Periode ini menandai fase transisional yang menentukan, ketika struktur politik lama runtuh dan tatanan baru mulai dibangun dalam suasana ketidakpastian. Dengan menempatkan Maluku Utara sebagai locus kajian, buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana politik lokal bekerja dalam konteks perubahan nasional yang cepat dan sering kali tidak linear.

Terdapat tiga peristiwa monumental yang saling berkelindan dalam periode tersebut, yakni pembentukan Provinsi Maluku Utara, transisi menuju sistem demokrasi pasca-Orde Baru, serta eskalasi konflik sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Ketiga peristiwa ini tidak dapat dipahami secara terpisah, sebab masing-masing saling mempengaruhi dan membentuk dinamika politik yang kompleks. Buku ini dengan tepat menempatkan persimpangan ketiganya sebagai kunci analisis untuk membaca politik lokal Maluku Utara secara lebih utuh.

Pembentukan Provinsi Maluku Utara tidak sekadar merupakan proses administratif-teritorial, melainkan juga sebuah arena kontestasi kepentingan politik dan simbolik. Status sebagai provinsi baru membuka ruang perebutan kekuasaan, sumber daya, dan legitimasi, baik di antara elite lokal maupun antara pusat dan daerah. Dalam konteks inilah, politik lokal menemukan momentumnya sebagai ruang pertarungan yang intens dan sarat makna.

Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 1999 menjadi titik fokus yang sangat strategis dalam buku ini. Pilgub tersebut tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral awal di daerah baru, tetapi sebagai arena konflik simbolik, artikulasi identitas, dan perebutan sumber daya politik. Dampak dari kontestasi ini tidak berhenti pada hasil pemilihan semata, melainkan membentuk pola relasi kekuasaan dan konflik yang beresonansi hingga dekade-dekade berikutnya.

Salah satu kontribusi penting buku ini terletak pada kemampuannya mengaitkan dinamika politik kontemporer dengan warisan sejarah yang panjang. Eksistensi kesultanan-kesultanan Moloku Kie Raha tidak diperlakukan sebagai artefak masa lalu, melainkan sebagai kekuatan simbolik dan kultural yang terus berinteraksi dengan institusi demokrasi modern. Interaksi ini kerap melahirkan ketegangan, tetapi sekaligus

membuka ruang negosiasi antara tradisi dan modernitas dalam praktik politik lokal.

Selain faktor historis, buku ini juga mengkaji secara mendalam politisasi identitas berbasis etnis dan agama dalam kontestasi kekuasaan. Identitas tidak hanya berfungsi sebagai penanda sosial, tetapi sering dimobilisasi sebagai instrumen politik untuk membangun loyalitas, memperkuat basis dukungan, atau bahkan melegitimasi konflik. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana identitas bekerja dalam lanskap politik daerah kepulauan yang plural.

Dimensi ekonomi-politik juga memperoleh perhatian yang memadai dalam buku ini, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan distribusi kekuasaan ekonomi. Buku ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi tidak pernah netral, melainkan berkelindan erat dengan konfigurasi elite dan jaringan patronase. Relasi antara kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi menjadi salah satu faktor kunci dalam menjelaskan keberlanjutan konflik dan ketimpangan pembangunan di Maluku Utara.

Menariknya, analisis dalam buku ini tidak berhenti pada level elite dan institusi formal. Penulis berupaya menangkap suara, pengalaman, dan harapan masyarakat akar rumput yang hidup di tengah pusaran konflik dan ketidakpastian politik. Perspektif ini memberikan keseimbangan analisis sekaligus menegaskan bahwa politik lokal pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan dan masa depan masyarakat.

Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa ilmu politik, pemerintahan, sejarah, dan sosiologi, serta bagi para praktisi kebijakan, birokrat, dan politisi daerah. Dengan memadukan data historis, studi kasus, dan kerangka teoretis yang kuat, buku ini menawarkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif. Pembaca diajak untuk melihat politik lokal sebagai proses yang dinamis dan kontekstual.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul *Dinamika Politik Lokal Pasca Pilgub Maluku Utara 1999: Sebuah Pendekatan Historik, Konflik, dan Transformasi Kekuasaan* ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya akademik untuk memahami dan menjelaskan dinamika politik lokal dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi.

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang lahir pada masa awal Reformasi, sebuah periode yang ditandai oleh perubahan struktural dalam sistem politik nasional. Proses pembentukan provinsi ini berlangsung dalam situasi sosial-politik yang kompleks, ditandai oleh konflik sosial, tarik-menarik kepentingan elite, serta penataan ulang kekuasaan di tingkat lokal. Kondisi tersebut menjadikan Maluku Utara sebagai wilayah yang relevan untuk dikaji dalam studi politik lokal dan desentralisasi.

Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 1999 memiliki posisi strategis dalam sejarah politik daerah ini. Pilgub tersebut tidak hanya merepresentasikan mekanisme elektoral awal di provinsi baru, tetapi juga mencerminkan dinamika konflik, fragmentasi elite, serta kontestasi identitas dan kekuasaan yang berkembang pada masa transisi. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi fokus utama dalam analisis yang disajikan dalam buku ini.

Buku ini menggunakan pendekatan historik dengan memadukan analisis konflik dan transformasi kekuasaan untuk membaca dinamika politik lokal secara lebih komprehensif. Pendekatan tersebut memungkinkan penulis menempatkan peristiwa politik tidak semata sebagai fakta institusional, melainkan sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh konteks sejarah, struktur kekuasaan, dan relasi antaraktor politik.

Penyusunan buku ini didukung oleh berbagai sumber data, baik berupa dokumen, literatur akademik, maupun keterangan dari para narasumber yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan tentang dinamika politik Maluku Utara. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada civitas academica di [Nama Universitas], rekan-rekan peneliti di [Nama Lembaga Penelitian], serta para narasumber di Maluku Utara yang telah memberikan kontribusi berharga bagi penyusunan karya ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Dukungan tersebut, baik dalam bentuk diskusi ilmiah, masukan akademik, maupun dorongan moral, turut berperan dalam menyempurnakan substansi buku ini.

Diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi politik lokal, khususnya terkait dengan isu desentralisasi, konflik, dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, serta pengambil kebijakan yang memiliki perhatian terhadap dinamika politik daerah.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat memantik diskusi akademik yang lebih luas serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan sensitif terhadap konteks lokal. Lebih dari sekadar catatan sejarah politik, buku ini merupakan ajakan untuk merefleksikan kembali perjalanan sebuah provinsi yang berada di persimpangan jalan sejarah, serta untuk membayangkan masa depan Maluku Utara yang lebih demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1: GENESIS PROVINSI MALUKU UTARA	
DAN KONTEKS POLITIK 1999	1
PENDAHULUAN	1
A. Perjalanan Sejarah Pembentukan Provinsi Baru	3
1. Dinamika Administratif: Pemisahan dari Provinsi Maluku	3
2. Aspirasi Lokal dan Gerakan Elite dalam Perjuangan Pemekaran	4
3. Harapan Masyarakat Pasca-Pemekaran terhadap Kesejahteraan	4
B. Lanskap Politik Awal Transisi Demokrasi.....	5
1. Dampak Reformasi 1998 terhadap Tata Kelola Daerah.....	5
2. Struktur Kekuasaan Tradisional vs Struktur Birokrasi Modern	6
3. Kehadiran Partai Politik Baru di Wilayah Kepulauan	6
C. Pra-Kondisi Menjelang Pemilihan Gubernur Pertama	6
1. Mekanisme Pemilihan Gubernur oleh DPRD pada Masa Transisi.....	7
2. Polarisasi Dukungan di Tingkat Elite Politik Lokal	7
3. Isu Sentral: Keadilan Representasi dan Identitas Wilayah.....	8
KESIMPULAN.....	8
BAB 2: MEMORI KOLEKTIF DAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 1999	9
PENDAHULUAN	9
A. Anatomi Kerusakan Sosial di Penghujung Abad 20	11
1. Eskalasi Ketegangan Horizontal di Ternate, Tidore, dan Halmahera	12
2. Faktor Pemicu: Ekonomi, Lahan, dan Perebutan Sumber Daya	12
3. Dampak Kemanusiaan dan Gelombang Pengungsian Internal.....	13
B. Politisasi Identitas dalam Pusaran Konflik.....	13
1. Penggunaan Simbol Agama dan Kesukuan dalam Mobilisasi Massa	14

2. Peran Aktor Intelektual dan Kelompok Kepentingan Politik.....	15
3. Fragmentasi Sosial dan Pudarnya Perekat Budaya Lokal.....	15
C. Respons Negara dan Upaya Rekonsiliasi Awal	16
1. Kehadiran Aparat Keamanan dan Status Darurat Sipil	17
2. Peran Tokoh Agama dan Adat dalam Meredam Ketegangan.....	17
3. Perjanjian Damai: Antara Formalitas dan Realitas Lapangan	18
KESIMPULAN.....	18

BAB 3: DINAMIKA PILGUB 1999:

ANTARA PROSEDUR DAN DRAMA POLITIK	19
PENDAHULUAN.....	19
A. Proses Pemilihan Gubernur di DPRD Maluku Utara.....	21
1. Pertarungan Koalisi Partai di Parlemen Daerah.....	22
2. Visi dan Misi Kandidat dalam Membangun Provinsi Baru	22
3. Prosedur Pemungutan Suara dan Perdebatan Konstitusional.....	23
B. Intervensi Pusat dan Tarik Ulur Kepentingan Nasional	24
1. Pengaruh Kementerian Dalam Negeri terhadap Hasil Pilgub.....	25
2. Hubungan Jakarta-Maluku Utara: Pola Hubungan Pusat-Daerah	25
3. Lobi-lobi Elite Lokal di Tingkat Nasional.....	26
C. Kontroversi Hasil Pemilihan dan Dualisme Kepemimpinan	26
1. Sengketa Hasil Perolehan Suara di Meja Hijau	27
2. Ketegangan Massa Pendukung antar Kandidat Gubernur.....	27
3. Legitimasi Kekuasaan di Mata Publik Maluku Utara.....	28
KESIMPULAN.....	28

BAB 4: KESULTANAN DAN POLITIK TRADISIONAL DI ERA MODERN

PENDAHULUAN.....	31
A. Eksistensi Empat Kerajaan (Moloku Kie Raha)	32
1. Peran Budaya Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan	32
2. Adaptasi Institusi Adat dalam Sistem Politik Demokrasi	33
3. Simbolisme Kekuasaan Tradisional sebagai Alat Legitimasi	33
B. Pengaruh Sultan dalam Mobilisasi Politik Lokal	34
1. Keterlibatan Langsung Sultan dalam Kontestasi Pemilu.....	35

2. Hubungan Emosional antara Rakyat-Subjek dan Elite Kerajaan	35
3. Rivalitas Historis antar Kesultanan dalam Politik Kontemporer	36
C. Dualisme Otoritas: Birokrasi vs Kekuatan Adat	36
1. Konflik Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan Daerah ..	37
2. Rebutan Pengaruh di Sektor Pembangunan dan Pariwisata	37
3. Upaya Integrasi Nilai Adat ke dalam Peraturan Daerah	37
KESIMPULAN.....	38

BAB 5: TRANSFORMASI ELITE POLITIK PASCA PILGUB 199939

PENDAHULUAN	39
A. Munculnya Wajah-wajah Baru dalam Panggung Politik	41
1. Pergeseran dari Elite Birokrasi ke Elite Pengusaha dan Aktivis.....	41
2. Profil Pemimpin Daerah: Latar Belakang dan Basis Massa	42
3. Regenerasi Politik: Tantangan bagi Politisi Muda Malut	42
B. Sirkulasi Kekuasaan dan Pola Rekrutmen Politik.....	43
1. Dominasi Keluarga Tertentu dalam Jabatan Publik (Politik Dinasti).....	43
2. Peran Partai Politik dalam Mencetak Kader Pemimpin	44
3. Seleksi Elite melalui Mekanisme Pilkada Langsung	44
C. Patronase dan Klientelisme dalam Hubungan Elite-Massa	45
1. Mekanisme Pertukaran Kepentingan menjelang Pemilu	46
2. Pengaruh Modal Finansial dalam Mempertahankan Kekuasaan	46
3. Budaya "Balas Budi" dalam Birokrasi Pemerintahan	46
KESIMPULAN.....	47

BAB 6: GEOPOLITIK KEPULAUAN DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN49

PENDAHULUAN	49
A. Representasi Wilayah: Halmahera vs Gugusan Kepulauan	50
1. Isu Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah Kabupaten/Kota	51
2. Tuntutan Pemekaran Wilayah Baru sebagai Solusi Politik	51
3. Alokasi Anggaran dan Proyek Strategis Nasional di Daerah	52
B. Politik Ibu Kota: Sofifi vs Ternate.....	52
1. Sejarah Perpindahan Pusat Pemerintahan ke Sofifi	53
2. Hambatan Infrastruktur dan Enggan-nya ASN Berdomisili.....	53

3. Implikasi Politik terhadap Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	54
C. Aksesibilitas dan Konektivitas sebagai Isu Politik	54
1. Janji Politik seputar Pembangunan Dermaga dan Bandara	55
2. Pengaruh Geografi terhadap Efektivitas Kampanye Politik	55
3. Kesenjangan Digital dan Arus Informasi di Pulau Terluar	56
KESIMPULAN	56

BAB 7: EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM (PERTAMBANGAN) 57

PENDAHULUAN	57
A. Gurita Tambang dan Kontestasi Kekuasaan	58
1. Hubungan antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pendanaan Politik	59
2. Dominasi Perusahaan Nikel di Halmahera Tengah dan Selatan	59
3. Konflik Agraria antara Korporasi, Pemerintah, dan Warga Lokal	60
B. Dampak Investasi Asing terhadap Stabilitas Politik Lokal	60
1. Kehadiran Tenaga Kerja Asing sebagai Isu Sensitif Politik	61
2. Kontribusi PAD vs Kerusakan Lingkungan: Perdebatan Kebijakan	62
3. Peran Pemerintah Daerah dalam Negosiasi Kontrak Karya	62
C. Kesejahteraan Masyarakat di Lingkar Tambang	63
1. Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan	63
2. Ketimpangan Ekonomi: Kaya Sumber Daya, Miskin Fasilitas	64
3. Gerakan Perlawanan Masyarakat Adat terhadap Eksploitasi	64
KESIMPULAN	65

BAB 8: PERAN MEDIA MASSA DAN OPINI PUBLIK LOKAL 67

PENDAHULUAN	67
A. Evolusi Media Cetak dan Elektronik di Maluku Utara	68
1. Sejarah Surat Kabar Lokal dalam Mengawal Pemerintahan	69
2. Independensi Media di Tengah Kepemilikan Tokoh Politik	69
3. Peran Jurnalisme Warga dalam Media Sosial	70
B. Media sebagai Alat Propaganda dan Pendidikan Politik	70
1. Strategi "Branding" Kandidat melalui Media Massa	71

2. Penanganan Isu Hoaks dan Kampanye Hitam saat Pilkada	71
3. Ruang Publik Digital: Diskusi Politik di Grup Facebook dan WhatsApp	72
C. Survei Opini dan Pergeseran Perilaku Memilih	72
1. Pengaruh Lembaga Survei dalam Menentukan Peta Kemenangan	73
2. Karakteristik Pemilih Rasional vs Pemilih Tradisional.....	73
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu pasca 1999	74
KESIMPULAN.....	74

BAB 9: BIROKRASI DAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU.....77

PENDAHULUAN	77
A. Politisasi Birokrasi: Jabatan sebagai Hadiah Politik.....	78
1. Fenomena "Mutasi Massal" Pasca Pergantian Kepala Daerah	79
2. Budaya Loyalitas ASN kepada Sosok, Bukan Sistem	80
3. Dampak Ketidaknetralan terhadap Kualitas Pelayanan Publik.....	80
B. Reformasi Birokrasi di Wilayah Kepulauan	81
1. Tantangan Penerapan Sistem Merit di Daerah Konflik Kepentingan	81
2. Profesionalisme ASN dalam Mengelola Anggaran Daerah	82
3. Inovasi Pelayanan Publik di Tengah Keterbatasan Fasilitas.....	82
C. Peran Badan Pengawas dalam Menjaga Netralitas.....	82
1. Efektivitas Sanksi bagi ASN yang Terlibat Politik Praktis.....	83
2. Tekanan Elite terhadap Pejabat Struktural di Daerah	83
3. Perlindungan bagi ASN "Whistleblower" Pelanggaran Pemilu.....	84
KESIMPULAN.....	84

BAB 10: PEREMPUAN DALAM DINAMIKA POLITIK MALUKU UTARA87

PENDAHULUAN	87
A. Hambatan Kultural dan Struktural Partisipasi Perempuan	88
1. Budaya Patriarki dan Pandangan Keagamaan tentang Pemimpin Perempuan	89
2. Minimnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen Daerah (DPRD)	89
3. Akses Terhadap Pendanaan dan Jaringan Politik bagi Caleg Perempuan	90
B. Kiprah Tokoh Perempuan dalam Politik Lokal.....	90

1. Profil Pemimpin Perempuan (Bupati/Walikota) di Maluku Utara.....	91
2. Peran Istri Kepala Daerah dalam Organisasi Sosial dan Politik.....	91
3. Gerakan Aktivis Perempuan dalam Mengawal Isu Gender	92
C. Masa Depan Affirmative Action di Maluku Utara	92
1. Efektivitas Kebijakan Kuota 30% dalam Daftar Calon Tetap	93
2. Pendidikan Politik bagi Pemilih Perempuan di Pedesaan	93
3. Isu-isu Strategis: Kesehatan Ibu, Anak, dan Ekonomi Perempuan.....	94
KESIMPULAN.....	94

BAB 11: GERAKAN MAHASISWA DAN AKTIVISME LOKAL..... 97

PENDAHULUAN.....	97
A. Sejarah Perlawanan Mahasiswa Maluku Utara	98
1. Peran Mahasiswa dalam Mengawal Pemekaran Provinsi	99
2. Aksi Demonstrasi Pasca Pilgub 1999: Simbol Kekecewaan Rakyat	99
3. Aliansi Mahasiswa Antar-Pulau dalam Menuntut Keadilan.....	100
B. Laboratorium Politik: Organisasi Intra dan Ekstra Kampus	100
1. Kaderisasi Aktivis sebagai Penyuplai Elite Politik Masa Depan	101
2. Hubungan Organisasi Mahasiswa dengan Kekuatan Politik Nasional.....	101
3. Idealisme vs Pragmatisme: Fenomena Aktivis yang Masuk Sistem.....	102
C. Kontribusi LSM dalam Advokasi Kebijakan Daerah	102
1. Pengawasan Anggaran dan Isu Korupsi oleh Aktivis Anti-Korupsi	102
2. Pendampingan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria	103
3. Peran NGO Internasional dalam Pemulihan Pasca Konflik	103
KESIMPULAN.....	104

BAB 12: AGAMA, NEGARA, DAN HARMONI SOSIAL 105

PENDAHULUAN.....	105
A. Agama sebagai Identitas dan Inspirasi Politik	106
1. Pengaruh Organisasi Keagamaan (NU, Muhammadiyah, dll).....	107
2. Penggunaan Dalil Agama dalam Retorika Kampanye	107

3. Hubungan antar Lembaga Keagamaan dengan Pemerintah Daerah	108
B. Menjaga Toleransi di Wilayah Bekas Konflik	108
1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	109
2. Pendidikan Multikultural di Sekolah dan Komunitas	109
3. Arsitektur Perdamaian: Membangun Kembali Tempat Ibadah yang Rusak	110
C. Fiqih Politik Lokal: Adaptasi Nilai Islam di Malut	110
1. Pandangan Ulama Lokal tentang Kepemimpinan Non-Muslim	111
2. Konsep "Khalifah" dan "Pelayan Masyarakat" dalam Politik Lokal	111
3. Mitigasi Radikalisme dan Ekstrimisme di Wilayah Strategis ...	111
KESIMPULAN	112

BAB 13: DINAMIKA PEMILIHAN

KEPALA DAERAH LANGSUNG (PILKADA)	113
PENDAHULUAN	113
A. Era Baru Demokrasi Lokal: Dari DPRD ke Rakyat	115
1. Analisis Pilkada Langsung Pertama di Maluku Utara (2007) ...	115
2. Perubahan Pola Kampanye: Dari Lobi Parlemen ke Blusukan	116
3. Biaya Politik yang Tinggi dan Munculnya Sponsor Politik	116
B. Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK)	117
1. Rekam Jejak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Malut	118
2. Fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penyebabnya	118
3. Legitimasi Kemenangan yang Diputuskan oleh Hakim MK	119
C. Dampak Pilkada Langsung terhadap Stabilitas Daerah	119
1. Polarisasi Massa yang Berkepanjangan pasca Pilkada	120
2. Inovasi Kepala Daerah Terpilih hasil Pilihan Rakyat	120
3. Evaluasi Sistem Pilkada Langsung: Kelebihan dan Kekurangan	120
KESIMPULAN	121

BAB 14: KEKUASAAN DAN KORUPSI DI TINGKAT LOKAL

PENDAHULUAN	123
A. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Daerah	124
1. Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	125

2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang Tidak Tepat Sasaran	125
3. "Jual Beli" Jabatan dalam Struktur Birokrasi Daerah	126
B. Penegakan Hukum: Kasus-Kasus Korupsi Fenomenal	126
1. Analisis Kasus Korupsi yang Menjerat Kepala Daerah (Gubernur/Bupati)	127
2. Peran KPK dan Kejaksaan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)	127
3. Dampak Hukum terhadap Kepercayaan Publik pada Institusi Politik	128
C. Strategi Pencegahan dan Penguatan Transparansi	128
1. Implementasi E-Government dan E-Budgeting di Maluku Utara	128
2. Peran Masyarakat Sipil dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa	129
3. Membangun Budaya Anti-Korupsi melalui Pendidikan Karakter	129
KESIMPULAN	130
BAB 15: HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS	131
PENDAHULUAN	131
A. Dinamika Hubungan Jakarta dan Sofifi	132
1. Ketergantungan Fiskal: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Khusus (DAK)	133
2. Koordinasi antar Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah	134
3. Pengaruh Kebijakan Nasional terhadap Arah Pembangunan Lokal	135
B. Wacana Otonomi Khusus atau Provinsi Kepulauan	135
1. Latar Belakang Tuntutan Status Khusus bagi Maluku Utara ...	136
2. Perjuangan RUU Daerah Kepulauan di Tingkat Nasional	136
3. Implikasi Pendanaan dan Kewenangan jika Status Khusus Tercapai	137
C. Manajemen Perbatasan dan Kedaulatan Wilayah	137
1. Posisi Strategis Maluku dalam Perspektif Keamanan Nasional	137
2. Kerjasama antar Provinsi di Wilayah Timur Indonesia	138
3. Perlindungan Sumber Daya Laut dari Pencurian Kapal Asing	138
KESIMPULAN	139

BAB 16: POLITIK IDENTITAS DAN ETNISITAS DALAM PEMILU	141
PENDAHULUAN	141
A. Kebangkitan Sentimen Etnisitas pasca 1999	143
1. Isu "Putra Daerah" dalam Jabatan Struktural dan Politik	143
2. Fragmentasi Etnis di Wilayah Halmahera (Utara vs Selatan)	144
3. Pengaruh Ikatan Persaudaraan (Keluarga Besar) dalam Pemungutan Suara	144
B. Manajemen Konflik Berbasis Identitas	145
1. Peran Tokoh Kunci dalam Meredam Sentimen Etnis yang Destruktif	145
2. Strategi Akomodasi Politik: Pembagian Jatah Jabatan antar Etnis	146
3. Mitigasi Politisasi SARA dalam Tahapan Pemilu	146
C. Integrasi Budaya dan Politik Inklusif	147
1. Simbolisme Adat yang Menyatukan Berbagai Suku (Hibualamo)	147
2. Keberhasilan Pemimpin yang Melampaui Sekat Etnisitas	147
3. Peran Pendidikan dalam Membentuk Identitas Kewargaan (Civic Identity)	148
KESIMPULAN	148
 BAB 17: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN JANJI POLITIK	151
PENDAHULUAN	151
A. Politik Anggaran untuk Pembangunan Fisik	153
1. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera sebagai Komoditas Politik	153
2. Misteri Proyek Mangkrak: Antara Kegagalan Perencanaan dan Korupsi	154
3. Hubungan Pembangunan Fasilitas Publik dengan Basis Suara	154
B. Akses Pendidikan dan Kesehatan di Pulau-pulau Terpencil	155
1. Janji Sekolah Gratis dan Beasiswa dalam Kampanye Pilkada	155
2. Realitas Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu)	156
3. Ketimpangan Kualitas Pendidikan antar Ternate dan Halmahera	156

C. Energi dan Air Bersih sebagai Isu Strategis.....	156
1. Krisis Listrik (Byar-Pet) dan Dampaknya terhadap Opini Publik	157
2. Perjuangan Akses Air Bersih di Wilayah Kepulauan Karang ...	157
3. Pemanfaatan Energi Terbarukan (Surya/Bayu) di Pedesaan ..	158
KESIMPULAN.....	158

BAB 18: POLITIK PARLEMEN LOKAL:

DINAMIKA DPRD MALUKU UTARA	161
PENDAHULUAN.....	161
A. Fungsi Legislasi dan Kualitas Produk Hukum Daerah	163
1. Analisis Peraturan Daerah (Perda) yang Dihasilkan DPRD	163
2. Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap Eksekutif	164
3. Peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).....	164
B. Hubungan Check and Balances: DPRD vs Gubernur	165
1. Dinamika Pengesahan APBD: Antara Kepentingan Rakyat dan Elite	165
2. Hak Angket dan Hak Interpelasi dalam Sejarah Politik Malut	166
3. Koalisi Pendukung vs Oposisi di Parlemen Lokal	166
C. Profil Anggota Legislatif: Representasi dan Kinerja.....	167
1. Latar Belakang Profesi Anggota DPRD (Pengusaha, Mantan Birokrat, dll)	167
2. Hubungan Anggota Dewan dengan Konstituen di Masa Reses	168
3. Isu Kehadiran dan Kedisiplinan Anggota Dewan	168
KESIMPULAN.....	168

BAB 19: TANTANGAN GLOBAL DAN DISRUPSI DI MALUKU UTARA

PENDAHULUAN.....	171
A. Maluku Utara di Tengah Arus Globalisasi.....	173
1. Dampak Perdagangan Bebas terhadap Nelayan dan Petani Rempah	173
2. Pariwisata Internasional: Potensi dan Tantangan Budaya Lokal	174
3. Migrasi Penduduk dan Transformasi Sosial di Kota Ternate	174

B.	Digitalisasi Birokrasi dan Politik.....	174
1.	Implementasi Smart City di Ternate dan Tantangannya	175
2.	Penggunaan E-Voting atau E-Recap dalam Pemilu Mendatang.....	175
3.	Cyber-Security: Perlindungan Data Pemerintah Daerah	176
C.	Keamanan Regional dan Isu Terorisme	176
1.	Pengawasan Wilayah Laut dari Selundupan Senjata dan Narkoba.....	177
2.	Mitigasi Paham Radikal di Wilayah Pesisir.....	177
3.	Sinergi TNI/Polri dengan Masyarakat dalam Menjaga Kamtibmas	177
	KESIMPULAN.....	178
	BAB 20: MASA DEPAN POLITIK LOKAL MALUKU UTARA.....	179
	PENDAHULUAN	179
A.	Menuju Demokrasi yang Matang dan Substansial	180
1.	Penguatan Institusi Politik dan Budaya Hukum	181
2.	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan yang Berorientasi Kesejahteraan	181
3.	Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Pembangunan.....	181
B.	Visi Maluku Utara 2045: Menjadi Poros Maritim Timur	182
1.	Integrasi Ekonomi Berbasis Rempah dan Kelautan	182
2.	Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Vokasi	183
3.	Pelestarian Nilai Adat Kie Raha di Era Modernisasi	183
C.	Refleksi 25 Tahun Pasca Pilgub 1999.....	183
1.	Capaian dan Kegagalan dalam Perjalanan Otonomi Daerah	184
2.	Pelajaran dari Konflik dan Perdamaian bagi Bangsa Indonesia	184
3.	Penutup: Harapan Baru bagi Generasi Muda Maluku Utara	185
	KESIMPULAN.....	185
	GLOSSARY	187
	DAFTAR PUSTAKA	193
	PROFIL PENULIS	199
	PROFIL EDITOR.....	201

BAB 1:

GENESIS PROVINSI MALUKU UTARA DAN KONTEKS POLITIK 1999

PENDAHULUAN

Bagaimana sebuah entitas administratif baru yang lahir dari rahim euforia reformasi dapat secara bersamaan terjerumus ke dalam salah satu konflik komunal paling kelam dalam sejarah modern Indonesia? Pertanyaan ini menjadi titik berangkat fundamental untuk memahami kompleksitas yang melingkupi pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999. Kelahiran provinsi ini bukanlah sekadar peristiwa teknis pemekaran wilayah, melainkan sebuah kulminasi dari aspirasi historis, pertarungan elite lokal, dan harapan kolektif masyarakat akan masa depan yang lebih sejahtera. Proses ini terjadi pada momentum yang sangat krusial, yakni saat Indonesia sedang bergerak limbung dari otoritarianisme menuju demokrasi, sebuah transisi yang membuka ruang bagi artikulasi politik yang selama ini terbungkam.

Lanskap Maluku Utara pada penghujung abad ke-20 diwarnai oleh paradoks yang tajam. Di satu sisi, ada optimisme yang membuncah. Pemisahan dari Provinsi Maluku yang berpusat di Ambon dipandang sebagai jalan untuk memotong rantai birokrasi yang panjang, mempercepat pembangunan, dan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara lebih mandiri. Gagasan otonomi daerah menjadi mantra yang menjanjikan pemberdayaan dan keadilan distributif bagi sebuah kawasan yang secara historis pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia namun terasa terpinggirkan dalam kerangka negara modern (Amal, 2016). Harapan ini menjadi bahan bakar utama bagi gerakan pemekaran yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat.

BAB 2:

MEMORI KOLEKTIF DAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 1999

PENDAHULUAN

Tahun 1999 bukan sekadar penanda pergantian milenium bagi masyarakat Maluku Utara, melainkan sebuah titik balik traumatis yang merobek tatanan sosial yang telah terjalin selama berabad-abad. Di tengah euforia reformasi dan terbentuknya provinsi baru, wilayah ini justru terperosok ke dalam pusaran kekerasan komunal yang sangat destruktif. Konflik ini tidak meletus dalam ruang hampa, tetapi merupakan akumulasi dari ketegangan struktural, perebutan sumber daya, dan renegosiasi identitas yang gagal dikelola oleh institusi negara yang sedang melemah (Wilson, 2008). Memori kolektif tentang peristiwa ini menjadi bayang-bayang panjang yang terus memengaruhi dinamika politik lokal hingga hari ini, menciptakan garis demarkasi psikologis antar-kelompok masyarakat.

Kekerasan yang terjadi di Maluku Utara memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan konflik serupa di Ambon atau Poso. Jika di wilayah lain konflik sering disederhanakan sebagai benturan antar-agama, di Maluku Utara dimensinya jauh lebih kompleks, melibatkan pertentangan antara adat dan agama, rivalitas antar-kesultanan, serta persaingan perebutan wilayah administratif baru (Bubandt, 2014). Pembentukan Kecamatan Malifut pada tahun 1999, yang menjadi pematik awal konflik di Halmahera Utara, hanyalah puncak gunung es dari persoalan agraria dan demografi yang telah lama terabaikan. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendeteksi dini potensi gesekan ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi kelembagaan pada masa transisi tersebut.

Eskalasi konflik menyebar dengan cepat dari daratan Halmahera ke pulau-pulau kecil seperti Ternate dan Tidore, mengikuti jalur kekerabatan dan aliansi politik tradisional. Mobilisasi massa terjadi bukan hanya karena sentimen kebencian, tetapi juga didorong oleh ketakutan eksistensial akan

BAB 3:

DINAMIKA PILGUB 1999: ANTARA PROSEDUR DAN DRAMA POLITIK

PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara tahun 1999 merupakan peristiwa politik monumental yang tidak hanya menandai langkah awal provinsi ini sebagai entitas otonom, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi transisi demokrasi di tingkat lokal. Kontestasi ini berlangsung dalam suasana ketidakpastian yang ekstrem, di mana euforia pemekaran wilayah bertabrakan langsung dengan realitas infrastruktur politik yang belum matang. Berbeda dengan pemilihan langsung yang dikenal saat ini, mekanisme pemilihan pada masa itu masih dilakukan melalui pemungutan suara oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebuah sistem yang sangat rentan terhadap manipulasi elitis dan politik transaksional (money politics) di ruang tertutup.

Dinamika Pilgub 1999 tidak dapat dipisahkan dari konteks nasional yang sedang bergejolak, yaitu masa transisi dari pemerintahan B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Lemahnya kontrol pusat terhadap daerah menciptakan celah bagi elite lokal untuk bermanuver secara agresif, sering kali melampaui batas-batas etika politik dan hukum. Perebutan kursi gubernur pertama ini bukan sekadar kompetisi administratif, melainkan sebuah pertarungan hidup-mati antara kekuatan status quo (Orde Baru) yang ingin mempertahankan dominasinya dan kekuatan reformis, atau mereka yang melabeli diri demikian, yang ingin merebut kendali atas sumber daya ekonomi dan politik yang baru terbuka (Wilson, 2008).

Pertarungan ini mengerucut pada dua figur sentral yang mewakili polarisasi kekuatan tersebut: Abdul Gafur, tokoh nasional Golkar yang memiliki akar kuat di birokrasi pusat dan didukung oleh sentimen wilayah tertentu, berhadapan dengan Thaib Armaiyn, birokrat senior yang didukung oleh koalisi partai-partai Islam dan nasionalis non-Golkar. Rivalitas ini

BAB 4:

KESULTANAN DAN POLITIK TRADISIONAL DI ERA MODERN

PENDAHULUAN

Keunikan lanskap politik Maluku Utara terletak pada persistensi struktur kekuasaan tradisional yang hidup berdampingan, dan sering kali bersinggungan, dengan struktur negara demokrasi modern. Di tengah arus modernisasi birokrasi, institusi kesultanan, khususnya Ternate dan Tidore, tidak lantas memudar menjadi sekadar artefak sejarah di museum. Sebaliknya, mereka menunjukkan resiliensi yang luar biasa dengan merevitalisasi peran politik dan sosial mereka. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "demokrasi hibrida", di mana legitimasi elektoral yang rasional-legal bercampur dengan legitimasi karismatik-tradisional yang berakar pada mitos dan sejarah panjang *Moloku Kie Raha* (Amal, 2016).

Kebangkitan peran kesultanan pasca-Orde Baru didorong oleh desentralisasi yang memberikan ruang bagi identitas lokal untuk tampil ke permukaan. Jika di masa Soeharto peran sultan dikerdilkan menjadi sekadar simbol budaya di bawah kontrol ketat Golkar, era Reformasi menjadi panggung bagi para sultan untuk kembali merebut pengaruh politik riil. Mereka tidak hanya menjadi "penentu raja" (*kingmaker*) yang memberikan restu kepada kandidat politisi, tetapi juga terjun langsung sebagai aktor politik praktis yang memperebutkan jabatan publik, mulai dari anggota legislatif hingga kepala daerah (Umarama & S., 2024).

Namun, kembalinya kekuatan tradisional ini membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, kesultanan berfungsi sebagai penjaga identitas kultural dan perekat sosial yang efektif ketika institusi negara gagal memberikan rasa aman, seperti yang terlihat pada fase awal konflik komunal. Di sisi lain, rivalitas historis antar-kesultanan yang telah berlangsung berabad-abad sering kali terproyeksi ke dalam kontestasi politik modern, mempertajam polarisasi di masyarakat. Persaingan antara Ternate dan Tidore, misalnya,

BAB 5:

TRANSFORMASI ELITE POLITIK PASCA PILGUB 1999

PENDAHULUAN

Periode pasca-1999 menandai pergeseran tektonik dalam lanskap elite politik di Maluku Utara. Runtuhnya tatanan Orde Baru yang sentralistik dan terbukanya keran demokrasi melalui pemilihan kepala daerah telah secara fundamental mengubah kriteria dan jalur menuju kekuasaan. Konflik gubernur pertama pada tahun 1999 menjadi titik nol yang tidak hanya melahirkan provinsi baru, tetapi juga melahirkan konstelasi elite baru yang coraknya sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Jika sebelumnya kekuasaan didominasi oleh elite birokrasi dan militer yang ditunjuk oleh Jakarta, era baru membuka pintu bagi aktor-aktor dengan basis modal yang berbeda, terutama modal finansial dan modal sosial-kultural.

Transformasi ini ditandai oleh pergeseran dari dominasi birokrat-priyayi ke arah munculnya para pengusaha lokal sebagai kekuatan politik utama. Demokrasi, terutama setelah diperkenalkannya pemilihan kepala daerah langsung, ternyata membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi. Kebutuhan akan dana kampanye, logistik massa, dan "mahar" perahu partai politik secara alamiah menyeleksi individu-individu yang memiliki akses terhadap sumber daya finansial yang melimpah (Hadiz, 2010). Pengusaha-pengusaha yang bergerak di sektor perikanan, pertambangan, dan konstruksi kini melihat jabatan politik bukan hanya sebagai puncak pengabdian, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengamankan dan mengekspansi kepentingan bisnis mereka.

Di samping kelas pengusaha, panggung politik juga diramaikan oleh para aktivis dan tokoh masyarakat yang memperoleh legitimasi dari peran mereka selama era reformasi dan konflik komunal. Mereka yang berada di garis depan advokasi pemekaran provinsi atau perdamaian komunal berhasil mengkapitalisasi popularitas dan kepercayaan publik menjadi

BAB 6:

GEOPOLITIK KEPULAUAN DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN

PENDAHULUAN

Bagaimana geografi, sebaran pulau, selat, dan daratan, dapat menjadi cetak biru bagi distribusi kekuasaan politik? Di Maluku Utara, pertanyaan ini bukan sekadar wacana akademis, melainkan realitas sehari-hari yang membentuk alokasi anggaran, memicu konflik representasi, dan mendefinisikan kontestasi elektoral. Struktur geografis provinsi ini, yang terbagi antara satu daratan besar (Halmahera) dan ratusan pulau kecil yang mengelilinginya, menciptakan sebuah dikotomi spasial yang secara inheren bersifat politis. Ketegangan antara "pusat" dan "pinggiran" tidak hanya terjadi dalam relasi dengan Jakarta, tetapi tereplikasi secara tajam di dalam provinsi itu sendiri, melahirkan persaingan abadi antara Halmahera dan gugusan kepulauan lainnya, terutama Ternate dan Tidore.

Distribusi kekuasaan pasca-1999 sangat dipengaruhi oleh warisan sejarah di mana pusat-pusat peradaban dan administrasi kolonial tumbuh di pulau-pulau kecil yang strategis secara maritim. Ternate, sebagai bekas ibu kota provinsi dan pusat ekonomi, menikmati akumulasi infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses informasi yang tidak sebanding dengan wilayah Halmahera yang luas namun secara historis terabaikan (Amal, 2016). Kesenjangan ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai "Ternate-sentrisme", sebuah persepsi dominasi yang menjadi bahan bakar utama bagi politik identitas kewilayahan di Halmahera dan pulau-pulau terluar lainnya.

Politik di Maluku Utara, oleh karenanya, adalah politik tentang jarak. Jarak antara desa dan ibu kota kabupaten, jarak antara pulau dan pusat provinsi, serta jarak psikologis antara masyarakat yang merasa terwakili dan yang merasa ditinggalkan. Setiap janji kampanye, setiap alokasi APBD, dan setiap kebijakan pemekaran wilayah selalu dapat dibaca dalam kerangka

BAB 7:

EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM (PERTAMBANGAN)

PENDAHULUAN

Setelah euforia politik pemekaran dan trauma konflik komunal mereda, panggung dinamika Maluku Utara di abad ke-21 secara dominan dibentuk oleh kekuatan ketiga yang tak kalah dahsyat: ledakan investasi di sektor pertambangan. Jika dahulu pala dan cengkih menempatkan kepulauan ini dalam peta perdagangan dunia, kini nikel, emas, dan kobalt kembali menarik Maluku Utara ke dalam pusaran ekonomi-politik global. Masuknya modal raksasa ke sektor ekstraktif, terutama di daratan Halmahera, telah secara fundamental merombak struktur ekonomi, lanskap sosial, dan yang terpenting, arena kontestasi kekuasaan lokal. Kekayaan yang terkandung di perut bumi Halmahera menjanjikan akselerasi pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), namun di saat yang sama ia juga menjadi sumber kutukan (*resource curse*) yang melahirkan korupsi, ketimpangan, dan konflik baru.

Ekonomi politik pertambangan di Maluku Utara adalah kisah tentang bagaimana izin usaha menjadi komoditas politik yang lebih berharga daripada suara pemilih. Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), meskipun kini banyak ditarik ke pusat, pada masa-masa awal otonomi daerah menjadi instrumen utama bagi para elite politik lokal untuk membangun persekutuan strategis dengan para oligark bisnis. Terbentuklah sebuah simbiosis mutualisme antara politisi yang membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu dan pengusaha yang membutuhkan kepastian hukum dan proteksi politik untuk operasional tambang mereka (Hadiz, 2010). Aliansi politik-bisnis ini menjadi mesin utama yang menggerakkan demokrasi biaya tinggi di provinsi ini, sering kali dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

BAB 8:

PERAN MEDIA MASSA DAN OPINI PUBLIK LOKAL

PENDAHULUAN

Arena pertarungan politik di Maluku Utara tidak hanya berlangsung di ruang rapat DPRD atau di tengah kerumunan kampanye, tetapi juga secara intens terjadi di ruang-ruang redaksi, gelombang frekuensi radio, dan, yang paling riuh, di lini masa media sosial. Media massa, dalam segala bentuknya, telah bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi aktor politik yang kuat, mampu membentuk persepsi, mengarahkan opini publik, dan bahkan menentukan nasib seorang kandidat. Evolusi lanskap media di provinsi kepulauan ini, dari era dominasi koran lokal hingga ledakan informasi di era digital, mencerminkan dan sekaligus mempercepat perubahan dalam dinamika kekuasaan itu sendiri.

Pada masa-masa awal pasca-1999, media cetak lokal memainkan peran ganda yang heroik sekaligus problematik. Di satu sisi, mereka menjadi corong suara reformasi, memberikan ruang bagi kritik terhadap pemerintah yang sebelumnya terbungkam dan mengawal isu-isu krusial seperti pemekaran dan rekonsiliasi konflik. Namun, di sisi lain, independensi mereka sejak awal sudah berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik. Banyak media yang didirikan atau didanai oleh faksi-faksi politik tertentu, mengubah tajuk rencana menjadi buletin propaganda dan objektivitas jurnalistik menjadi barang langka (Wilson, 2008).

Memasuki dekade kedua abad ke-21, kemunculan media sosial, terutama Facebook dan WhatsApp, secara radikal mengubah cara politik dikomunikasikan dan dikonsumsi. Ruang publik tidak lagi dimonopoli oleh segelintir pemilik media. Setiap warga negara dengan ponsel pintar kini dapat menjadi produsen dan distributor informasi, menciptakan apa yang disebut jurnalisme warga. Fenomena ini mendemokratisasi arus informasi,

BAB 9:

BIROKRASI DAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU

PENDAHULUAN

Di balik layar drama pemilihan kepala daerah yang penuh warna, terdapat sebuah arena pertarungan yang lebih senyap namun tak kalah krusial: birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN), yang secara teoretis merupakan mesin administrasi yang netral dan profesional, dalam realitas politik lokal Maluku Utara sering kali terseret menjadi pion sekaligus sumber daya dalam permainan kekuasaan. Netralitas birokrasi bukanlah sebuah kondisi alamiah, melainkan sebuah cita-cita yang harus terus-menerus diperjuangkan di tengah tarikan kepentingan politik yang sangat kuat. Kegagalan untuk menjaga netralitas ini tidak hanya mencederai asas keadilan dalam pemilu, tetapi juga merusak fondasi pelayanan publik yang efektif.

Fenomena politisasi birokrasi menjadi begitu akut di daerah pasca-otonomi karena kepala daerah terpilih memegang kendali penuh atas manajemen kepegawaian, mulai dari pengangkatan, mutasi, promosi, hingga pemberhentian. Kewenangan yang sangat besar ini mengubah birokrasi dari institusi pelayanan menjadi "rampasan perang" (*spoils of war*). Bagi pemenang Pilkada, ribuan posisi ASN di seluruh jenjang pemerintahan dipandang sebagai aset yang dapat dibagikan kepada tim sukses, kerabat, dan aliansi politik sebagai bentuk "balas budi" atas dukungan mereka selama kampanye (Muhidin & Suswanta, 2023).

Budaya ini menciptakan sebuah dilema eksistensial bagi setiap ASN. Di satu sisi, mereka terikat oleh sumpah jabatan untuk melayani publik secara imparial dan taat pada peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, karier dan posisi mereka sangat bergantung pada loyalitas personal kepada kepala daerah yang sedang berkuasa. Menjadi netral sering kali berarti siap untuk dipinggirkan, dipindahkan ke posisi non-strategis, atau bahkan kehilangan

BAB 10:

PEREMPUAN DALAM DINAMIKA POLITIK MALUKU UTARA

PENDAHULUAN

Panggung politik Maluku Utara, dengan segala drama perebutan kekuasaan antar-elite, rivalitas geopolitik, dan cengkeraman ekonomi-politik tambang, selama ini didominasi oleh narasi dan aktor laki-laki. Namun, mengabaikan peran, posisi, dan perjuangan separuh populasi lainnya, yaitu perempuan, akan memberikan gambaran yang timpang dan tidak lengkap mengenai dinamika kekuasaan di daerah ini. Perempuan di Maluku Utara bukanlah entitas pasif yang sekadar mengikuti arus politik kaum pria. Mereka adalah pemilih mayoritas, penjaga jaring pengaman sosial di tingkat komunitas, dan, dalam beberapa kasus yang menonjol, berhasil mendobrak benteng patriarki untuk tampil sebagai pemimpin.

Partisipasi politik perempuan di Maluku Utara menghadirkan sebuah paradoks yang tajam. Di satu sisi, perempuan menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi sebagai pemilih dalam setiap pemilu. Keterlibatan mereka dalam organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dan adat juga sangat signifikan, menjadikan mereka target mobilisasi yang krusial bagi setiap kandidat. Namun, di sisi lain, konversi dari partisipasi elektoral yang tinggi ini menjadi keterwakilan politik yang substantif di lembaga-lembaga pengambil keputusan, seperti DPRD dan jabatan eksekutif, berjalan sangat lambat dan penuh hambatan (Rasyid, 2024).

Hambatan ini bersifat multidimensional, terbentang dari tataran kultural hingga struktural. Budaya patriarki yang mengakar kuat, ditopang oleh interpretasi keagamaan dan adat yang cenderung menempatkan perempuan di ranah domestik, menciptakan "langit-langit kaca" (*glass ceiling*) yang sulit ditembus. Secara struktural, mahalnnya biaya politik dalam demokrasi transaksional secara tidak proporsional lebih merugikan kandidat perempuan, yang umumnya memiliki akses lebih terbatas

BAB 11:

GERAKAN MAHASISWA DAN AKTIVISME LOKAL

PENDAHULUAN

Ketika institusi politik formal terjebak dalam perebutan kekuasaan elitis dan birokrasi terpolitisasi, dari mana datangnya suara koreksi dan kritik? Dalam dinamika politik Maluku Utara, peran sebagai "kekuatan ketiga" atau penjaga moral publik sering kali diisi oleh gerakan mahasiswa dan aktivisme masyarakat sipil. Mereka beroperasi di luar struktur negara dan pasar, memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat yang termarginalkan. Sejarah pasca-1999 di provinsi ini tidak dapat ditulis tanpa mengakui peran sentral gerakan ekstra-parlementer ini dalam menyuarkan tuntutan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Gerakan mahasiswa, khususnya, memiliki akar historis yang kuat dalam pembentukan provinsi itu sendiri. Jauh sebelum para politisi duduk di kursi empuk DPRD, para mahasiswalah yang turun ke jalan, menggelar mimbar bebas, dan melakukan lobi-lobi untuk mendesakkan pemekaran Maluku Utara dari provinsi induk. Energi dan idealisme mereka menjadi bahan bakar sosial yang memberikan legitimasi kerakyatan pada perjuangan elite di tingkat nasional. Posisi historis inilah yang memberikan mereka semacam otoritas moral untuk terus mengkritik jalannya pemerintahan di kemudian hari.

Pascakelahiran provinsi, peran mereka bergeser dari pendukung menjadi pengkritik. Kekacauan Pilgub 1999 dan eskalasi konflik komunal menjadi ujian terberat bagi gerakan mahasiswa. Di tengah elite yang terpolarisasi dan masyarakat yang terbelah, aliansi-aliansi mahasiswa lintas identitas dan lintas pulau mencoba untuk tetap menjaga kewarasan, menyerukan perdamaian, dan menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan kepemimpinan. Demonstrasi mahasiswa menjadi barometer

BAB 12:

AGAMA, NEGARA, DAN HARMONI SOSIAL

PENDAHULUAN

Di Maluku Utara, agama bukanlah sekadar sistem kepercayaan pribadi yang menempati ruang privat. Ia adalah kekuatan sosial dan politik yang dahsyat, sebuah arus bawah sadar kolektif yang mampu membentuk loyalitas, menggerakkan massa, dan mendefinisikan identitas. Sejarah provinsi ini, terutama tragedi kemanusiaan tahun 1999, telah memberikan pelajaran yang sangat mahal tentang bagaimana simbol-simbol suci dapat dimanipulasi menjadi senjata dalam perebutan kekuasaan duniawi. Namun, pada saat yang sama, agama juga terbukti menjadi sumber ketahanan sosial, inspirasi moral bagi kepemimpinan, dan fondasi utama bagi upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian.

Hubungan antara agama dan negara di Maluku Utara berjalan dalam sebuah tarian yang kompleks dan sering kali ambigu. Di satu sisi, negara (pemerintah daerah) memposisikan diri sebagai pengayom semua umat beragama, memfasilitasi pembangunan rumah ibadah, dan menggandeng para tokoh agama untuk menjaga stabilitas sosial. Terbentuklah sebuah hubungan simbiosis mutualisme, di mana negara membutuhkan legitimasi moral dari para ulama dan pendeta, sementara institusi keagamaan membutuhkan dukungan finansial dan proteksi politik dari negara. Relasi patronase ini menciptakan keteraturan, namun juga berisiko menumpulkan daya kritis agama terhadap kekuasaan.

Di sisi lain, agama tetap memiliki otonominya sebagai sumber nilai yang dapat dimobilisasi untuk menentang atau mendukung rezim politik yang berkuasa. Organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan dewan-dewan gereja merupakan kekuatan masyarakat sipil yang paling mengakar dan terorganisir. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke desa-desa terpencil, seruan atau fatwa dari para pemimpin mereka memiliki gaung politik yang jauh lebih kuat daripada slogan-slogan partai. Dalam setiap Pilkada, dukungan dari "langit" yang

BAB 13:

DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (PILKADA)

PENDAHULUAN

Pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat (Pilkada langsung) sejak tahun 2005 merupakan tonggak sejarah paling radikal dalam evolusi demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Perubahan ini bukan sekadar pergantian prosedur teknis pencoblosan, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam struktur relasi kekuasaan. Jika sebelumnya nasib seorang gubernur atau bupati ditentukan oleh lobi-lobi tertutup di antara segelintir elite partai di parlemen, kini legitimasi tersebut harus direbut langsung dari ratusan ribu pemilih yang tersebar di pulau-pulau. Kedaulatan rakyat yang selama ini abstrak, dipaksa untuk mewujudkan dalam bentuk suara (*vote*) yang dihitung satu per satu.

Transisi menuju demokrasi elektoral langsung di Maluku Utara tidak berjalan mulus seperti membalik telapak tangan. Ia hadir dengan membawa janji akuntabilitas sekaligus ancaman instabilitas. Di satu sisi, Pilkada langsung memaksa para elite politik untuk turun dari menara gading kekuasaan, menyapa rakyat di pasar-pasar tradisional, dan mendengarkan keluhan warga di pesisir Halmahera. Ada harapan bahwa pemimpin yang terpilih akan lebih responsif terhadap kebutuhan publik karena mereka sadar bahwa mandat mereka dapat dicabut oleh rakyat pada pemilu berikutnya. Inilah esensi dari pendalaman demokrasi yang dicita-citakan oleh gerakan Reformasi.

Namun, di sisi lain, Pilkada langsung di provinsi kepulauan ini segera menampilkan wajah gandanya yang problematik. Kompetisi terbuka membuka keran bagi maraknya politik uang (*vote buying*) yang lebih masif dan terstruktur. Karena kandidat harus menjangkau pemilih dalam jumlah besar, biaya politik meroket tajam, menciptakan ketergantungan mutlak

BAB 14:

KEKUASAAN DAN KORUPSI DI TINGKAT LOKAL

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang digulirkan sejak 1999 membawa janji manis tentang demokratisasi dan percepatan pembangunan melalui desentralisasi kewenangan. Namun, dalam dua dekade terakhir, janji tersebut tercederai oleh fenomena patologis yang mengiringinya, yakni desentralisasi korupsi. Jika pada masa Orde Baru praktik korupsi tersentralisasi di Jakarta dengan struktur piramida yang rapi, era reformasi justru menyebarkan praktik ini ke daerah-daerah, menciptakan raja-raja kecil yang membangun imperium kekayaan pribadi di atas mandat publik. Maluku Utara, sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam namun memiliki kapasitas birokrasi yang masih berkembang, menjadi salah satu lokus utama di mana paradoks desentralisasi ini bermanifestasi secara nyata.

Korupsi di tingkat lokal tidak lagi sekadar penyimpangan administratif atau pencurian uang kas kecil, melainkan telah bermetamorfosis menjadi sebuah sistem ekonomi-politik yang canggih. Ia melibatkan jaringan aktor yang luas, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD, birokrat, hingga pengusaha swasta. Praktik ini didorong oleh tingginya biaya politik (*high cost politics*) dalam sistem demokrasi elektoral. Seorang kandidat kepala daerah harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk biaya saksi, kampanye, dan mahar partai, yang sering kali jauh melampaui total gaji resmi yang akan mereka terima selama lima tahun menjabat (Hadiz, 2010).

Akibatnya, jabatan publik dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan modal investasi politik (*return on investment*) dan mengakumulasi modal untuk kontestasi berikutnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sejatinya merupakan instrumen fiskal untuk kesejahteraan rakyat, sering kali dibajak melalui mekanisme *mark-up*, proyek fiktif, dan suap. Sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan

BAB 15:

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS

PENDAHULUAN

Dinamika politik Maluku Utara tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yaitu relasi kuasa antara pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah daerah di Sofifi. Sejak digulirkannya otonomi daerah, hubungan ini diwarnai oleh ketegangan struktural antara hasrat untuk mandiri dan realitas ketergantungan. Maluku Utara, sebagai provinsi kepulauan dengan karakteristik geografis yang unik, sering kali merasa bahwa kebijakan nasional yang dirumuskan di Jakarta bersifat bias daratan (*land-biased*) dan kurang mengakomodasi tantangan logistik serta demografis yang dihadapi oleh wilayah kepulauan.

Ketegangan ini bermula dari desain desentralisasi Indonesia yang asimetris dalam praktiknya. Meskipun kewenangan administratif telah diserahkan ke daerah, kewenangan fiskal dan politik strategis masih terkonsentrasi kuat di pusat. Jakarta memegang kendali atas keran anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menjadi denyut nadi kehidupan birokrasi di daerah. Akibatnya, otonomi yang dirasakan oleh elite lokal sering kali hanyalah otonomi semu, di mana kreativitas daerah terpasung oleh petunjuk teknis dan prioritas nasional yang kaku.

Isu ketidakadilan fiskal menjadi pemicu utama munculnya wacana Otonomi Khusus atau pembentukan Provinsi Kepulauan. Elite politik dan masyarakat sipil Maluku Utara berargumen bahwa formula pembagian dana perimbangan yang berlaku saat ini, yang lebih menitikberatkan pada luas wilayah daratan dan jumlah penduduk, sangat merugikan provinsi yang 70 persen wilayahnya adalah lautan. Laut, yang bagi Jakarta sering dianggap hanya sebagai "penghubung", bagi Maluku Utara adalah wilayah kedaulatan yang membutuhkan biaya pengelolaan dan pengamanan yang sangat besar.

BAB 16:

POLITIK IDENTITAS DAN ETNISITAS DALAM PEMILU

PENDAHULUAN

Pasca-konflik komunal 1999, lanskap politik Maluku Utara mengalami metamorfosis yang signifikan dalam hal penggunaan identitas sebagai instrumen mobilisasi massa. Jika pada masa konflik garis demarkasi yang paling tajam adalah agama (Muslim versus Kristen), maka dalam era desentralisasi dan Pilkada langsung, garis tersebut bergeser dan bercabang menjadi sentimen etnisitas dan kedaerahan yang lebih spesifik. Identitas etnis, yang sebelumnya cair dan hidup berdampingan dalam harmoni *Moloku Kie Raha*, dikeraskan menjadi batas-batas politik yang kaku. Fenomena ini tidak lepas dari desain otonomi daerah itu sendiri yang memberikan insentif bagi pembentukan daerah otonom baru (pemekaran) berbasis pada homogenitas etnis, yang secara tidak langsung menyuburkan etno-nasionalisme lokal (Wilson, 2008).

Kebangkitan politik identitas etnis di Maluku Utara bukanlah fenomena alamiah semata, melainkan hasil konstruksi elite yang berkepentingan untuk mengamankan basis suara dalam kompetisi elektoral yang semakin ketat. Dalam pasar politik yang belum sepenuhnya rasional, sentimen "putra daerah" atau kesamaan suku menjadi jalan pintas yang paling efektif dan murah untuk membangun loyalitas pemilih. Para politisi lokal dengan cerdik merevitalisasi mitos-mitos asal-usul, sejarah kepahlawanan suku, dan narasi viktimisasi masa lalu untuk membingkai kontestasi politik sebagai perjuangan harga diri kelompok. Akibatnya, pemilu sering kali dipersepsikan bukan sebagai kompetisi program pembangunan, melainkan sebagai sensus kekuatan antar-suku.

BAB 17:

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN JANJI POLITIK

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Maluku Utara tidak pernah sekadar menjadi isu teknokratis mengenai beton, aspal, dan baja. Dalam lanskap politik lokal, infrastruktur adalah mata uang paling berharga yang dipertukarkan antara penguasa dan rakyat. Bagi masyarakat kepulauan yang selama berdekade-dekade hidup dalam isolasi geografis dan keterbatasan akses, kehadiran sebuah jembatan, jalan raya, atau dermaga bukan hanya mempermudah mobilitas, melainkan simbol hadirnya negara dan bentuk kasih sayang pemimpinnya. Oleh karena itu, narasi pembangunan fisik selalu menempati porsi terbesar dalam setiap visi-misi kandidat kepala daerah, menjadi materi kampanye yang paling riuh didengungkan, dan kelak menjadi tolok ukur utama keberhasilan atau kegagalan sebuah rezim.

Janji politik seputar infrastruktur memiliki daya pikat elektoral yang nyaris magis. Para politisi menyadari bahwa memori pemilih di Maluku Utara sangat visual; mereka lebih mudah mengingat sebuah gedung sekolah yang dicat baru atau jalan yang diaspal mulus daripada mengingat indikator makroekonomi atau reformasi birokrasi yang abstrak. Akibatnya, terjadi perlombaan untuk membangun monumen-monumen fisik yang kasatmata, sering kali dengan mengabaikan aspek perencanaan jangka panjang, keberlanjutan, dan urgensi kebutuhan riil masyarakat. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai politik mercusuar, di mana proyek-proyek raksasa dibangun demi prestise politik semata (Hadiz, 2010).

Namun, realitas pembangunan di lapangan sering kali tidak seindah janji kampanye. Keterbatasan anggaran daerah (APBD), kondisi geografis yang ekstrem, dan korupsi yang menggerogoti setiap lapis birokrasi menyebabkan banyak proyek infrastruktur berakhir mangkrak atau

BAB 18:

POLITIK PARLEMEN LOKAL: DINAMIKA DPRD MALUKU UTARA

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara memegang posisi sentral dalam arsitektur demokrasi lokal pasca-Reformasi. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan tiga fungsi utama: legislasi (pembentukan peraturan daerah), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam desain otonomi daerah, DPRD ditempatkan sejajar dengan Gubernur sebagai mitra kerja yang saling mengimbangi (*check and balances*). Namun, realitas politik di lapangan sering kali melenceng jauh dari desain ideal tersebut. Dinamika parlemen lokal di Maluku Utara lebih sering diwarnai oleh hubungan transaksional yang pragmatis daripada perdebatan ideologis yang substantif.

Sejarah kelembagaan DPRD Maluku Utara tidak dapat dilepaskan dari konteks transisi demokrasi yang bergejolak. Pada masa awal pembentukan provinsi tahun 1999, DPRD menjadi arena utama pertarungan politik elite, seperti yang terlihat dalam drama pemilihan gubernur pertama. Kala itu, DPRD memiliki kekuasaan absolut untuk memilih kepala daerah, menjadikannya institusi yang sangat *powerful* namun juga sangat rentan terhadap praktik politik uang. Peralihan ke pemilihan langsung sejak 2005 memang mengurangi kewenangan elektoral DPRD, namun tidak serta merta menghilangkan peran strategisnya dalam distribusi sumber daya daerah. Justru, fungsi anggaran menjadi instrumen baru bagi anggota dewan untuk menekan eksekutif demi kepentingan elektoral dan finansial.

Kinerja fungsi legislasi DPRD Maluku Utara kerap menjadi sorotan publik dan akademisi. Produktivitas dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) sering kali rendah secara kuantitas dan lemah secara kualitas. Banyak Perda yang dihasilkan hanyalah duplikasi dari peraturan di daerah lain atau sekadar menyalin undang-undang di atasnya tanpa

BAB 19:

TANTANGAN GLOBAL DAN DISRUPSI DI MALUKU UTARA

PENDAHULUAN

Maluku Utara tidak lagi dapat dipandang sebagai wilayah kepulauan yang terisolasi di pinggiran Pasifik. Gelombang globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah meruntuhkan sekat-sekat geografis yang selama berabad-abad menjadi pelindung sekaligus penghambat kemajuan daerah ini. Provinsi yang dahulu dikenal karena aroma rempah-rempahnya kini terintegrasi penuh ke dalam rantai pasok global melalui industri nikel dan baterai kendaraan listrik. Perubahan ini membawa konsekuensi yang mendalam: keputusan ekonomi di Shanghai atau kebijakan energi di Eropa kini memiliki dampak langsung terhadap nasib buruh tambang di Halmahera dan pedagang pasar di Ternate. Keterhubungan ini adalah pedang bermata dua yang menghadirkan peluang investasi sekaligus kerentanan terhadap fluktuasi pasar global.

Disrupsi digital juga telah merambah hingga ke pelosok desa. Kehadiran internet dan telepon pintar telah mengubah lanskap interaksi sosial dan politik secara radikal. Masyarakat Maluku Utara kini hidup dalam dua dunia sekaligus: dunia nyata dengan segala keterbatasan infrastrukturnya, dan dunia maya yang menawarkan kebebasan informasi tanpa batas. Fenomena ini memaksa birokrasi pemerintahan untuk beradaptasi atau ditinggalkan. Tuntutan akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis data semakin menguat, mendorong adopsi konsep *smart city* dan *e-government* yang sering kali tergagap-gagap menghadapi realitas budaya kerja birokrat yang masih konvensional (Muhidin & Suswanta, 2023).

Namun, keterbukaan ini juga membawa serta ancaman keamanan baru yang tidak mengenal batas negara. Posisi Maluku Utara sebagai beranda depan Indonesia di bibir Pasifik menjadikannya rentan terhadap kejahatan transnasional, mulai dari penyelundupan manusia, pencurian ikan, hingga

BAB 20:

MASA DEPAN POLITIK LOKAL MALUKU UTARA

PENDAHULUAN

Setelah menelusuri lorong waktu sejarah dari pembentukan provinsi, konflik komunal, hingga dinamika politik kontemporer yang penuh gejolak, kita kini tiba pada titik refleksi untuk menatap cakrawala masa depan Maluku Utara. Perjalanan seperempat abad otonomi daerah telah membawa provinsi ini jauh dari titik berangkatnya. Maluku Utara hari ini adalah entitas yang lebih percaya diri, dengan ekonomi yang tumbuh pesat didorong oleh hilirisasi industri dan infrastruktur yang perlahan membaik. Namun, di balik kilau statistik pertumbuhan, tersimpan pekerjaan rumah raksasa mengenai kualitas demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Masa depan politik Maluku Utara tidak akan lagi ditentukan semata-mata oleh siapa yang memenangkan kontestasi elektoral lima tahunan, melainkan oleh seberapa mampu sistem politik lokal bertransformasi dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial. Tantangan utamanya adalah memutus rantai oligarki dan politik uang yang telah berakar kuat, serta menggantinya dengan politik gagasan yang berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika tren pragmatisme saat ini terus berlanjut, demokrasi berisiko hanya menjadi cangkang kosong yang melayani kepentingan segelintir elite (Hadiz, 2010).

Visi masa depan juga harus menjawab pertanyaan eksistensial mengenai identitas Maluku Utara di abad ke-21. Apakah provinsi ini akan menjadi sekadar "tambang nasional" yang dikeruk isinya hingga habis, atau mampu mentransformasi diri menjadi Poros Maritim Timur yang berdaulat secara ekonomi dan budaya? Posisi strategis di bibir Pasifik menawarkan peluang emas untuk menjadi hub perdagangan dan logistik internasional,

DAFTAR PUSTAKA

- Aginda, M., Hasibuan, H., Tambunan, R., Falensky, M., & Wicaksono, S. (2025). Urban Growth Dynamics in the New Capital of North Maluku: A Spatiotemporal Perspective on Land Cover Transformation in Sofifi. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 15(3), 378. <https://doi.org/10.29244/jpsl.15.3.378>
- Amal, M. A. (2016). *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Gramedia Pustaka Utama.
- Agusmawanda, Wardani, S. B. E., Subekti, V. S., & Romli, L. (2024). Local Elite Configuration on a Small Island in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(4), 1-19. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3022>
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J., Braithwaite, V., Cookson, M., & Dunn, L. (2010). *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. ANU E Press.
- Bubandt, N. (2014). *The Empty Seashell: Witchcraft and Treason in Montezuma*. Cornell University Press.
- Butcher, J. G. (2004). *The Closing of the Frontier: A History of the Marine Fisheries of Southeast Asia c. 1850-2000*. ISEAS.
- Deni, A. (2025). Polarization of Muslim Voters in the 2024 Regional Elections in North Maluku. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 5(1), 26-44. <https://doi.org/10.22225/politicos.5.1.2025.26-44>
- Deni, A., Wance, M., & Muhtar, M. (2025). Moderated Identity Politics: Muslim Voters and Religious Depolarization in North Maluku's 2024 Gubernatorial Election. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(3). <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.63113>
- Duncan, C. R. (2005). The dynamics of protracted conflict in North Maluku, Indonesia. *Ethnopolitics*, 4(4), 369-387.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.

- Fraassen, C. F. van. (1987). *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel*. Rijksuniversiteit te Leiden.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Htun, M., & Ossa, J. P. (2013). Political Inclusion of Women: A Global Perspective. *Politics, Groups, and Identities*, 1(3), 397-417.
- Hughes, M. (2011). Intersectionality, Quotas, and Minority Women's Political Representation Worldwide. *American Political Science Review*, 105(3), 604-620.
- Husen, M., I., W., & Habib, A. (2023). Identity Political Power Relations Network Based on Social Capital: Case Study on the Regional Head Election in North Maluku Province. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, 10(2), 79-91. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.1002008>
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: ICW.
- Kementerian ESDM. (2023). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). *Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024: Pembangunan Wilayah Kepulauan*. Jakarta: Bappenas.
- Kittilson, M. C. (2006). *Challenging Parties, Changing Parliaments: Women and Elected Office in Contemporary Western Europe*. The Ohio State University Press.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2022). *Laporan Tahunan KASN 2021: Mengawal Sistem Merit, Menjaga Netralitas ASN*. Jakarta: KASN.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022: Sinergi Berantas Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Kurniawan, T. (2016). Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Era Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 127-147.
- Lasatira, F. (2022). Gereja Orang Basudara: The Contested Narrative from The Protestant Church of Moluccas. *AJIRSS: Asian Journal of Innovative Research in Social Science*, 1(2), 1-15. <https://doi.org/10.53866/ajirss.v1i2.111>
- Leirissa, R. Z. (2000). *Ternate, Tidore dan Dunia: Kumpulan Tulisan tentang Sejarah Sosial-Politik Maluku Utara*. Pustaka Sinar Harapan.

- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Mietzner, M. (2010). Indonesia's Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Oligarchy?. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Soeharto's New Order and its Legacy*. ANU E Press.
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587-610.
- Muhidin, B., & Suswanta, S. (2023). Burocracy Politization Typology in Structural Official Replacement (Case Study in Regional Government of North Maluku Province). *International Journal of Social Service and Research*, 3(2), 433-445. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i2.279>
- Nanuru, R., Ruhulessin, J., & Ruimassa, A. (2025). A contextual model of religious moderation in the 'Orang Basudara' Church: Insights from the Protestant Church of Maluku (GPM). *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 81(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.10467>
- Nugroho, Y., & Syarief, S. S. (2022). The Politics of Disinformation: A Study of Hoaxes in Indonesian Regional Elections. *Journal of Contemporary Southeast Asia*, 44(2), 258-283.
- Prasojo, E. (2018). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Strategi dan Tantangan*. Rajawali Pers.
- Purnamasari, D. (2025). Political Communication and Candidate Image Construction in Regional Head Elections (Case Study of Sherly Tjoanda's Candidate in The North Maluku Governoral Elections). *Social Impact Journal*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.61391/sij.v4i1.263>
- Rasyid, S. (2024). How Women Participate in Regional Elections as Candidates After North Maluku Became New Province?. *Journal of Governance and Public Affairs*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/fn83zh27>
- S Yunanto (2022). Religion and Power Comparing Political Landscape in the Religious Conflicts in Poso and Maluku. *Advances in Politics and Economics*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.22158/ape.v5n1p99>
- Resosudarmo, B. P. (2005). *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources*. ISEAS.
- Salim, I., & Aspinall, E. (2023). Polling Power: The Influence of Opinion Surveys on Electoral Politics in Decentralized Indonesia. *Asian Survey*, 63(4), 451-478.

- Schulze, K. E. (2002). The role of the military in the Maluku conflict. *The Brown Journal of World Affairs*, 9(1), 221-231.
- Septiadi, F., Mahmudi, I., Rachdical, M., & Putranto, A. (2025). Analisis Kegagalan Pasangan Calon Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid pada Pilgub Malut 2024. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.35870/jimik.v6i1.1295>
- Sherlock, S. (2010). *The Parliament of Indonesia: Representation, Reform, People, and Power*. Routledge.
- Sidel, J. T. (2006). *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Cornell University Press.
- Sidel, J. T. (2007). *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Cornell University Press.
- Suhartono, S. (2021). The Effectiveness of 30% Quota Policy for Women in the Parliament of Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(2), 78-90.
- Sulistiyanto, P. (2001). Whither the fragile peace in Maluku?. *Inside Indonesia*, 66.
- Thoha, M. (2017). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Kencana.
- Tomagola, T. A. (2000). *Tragedi Maluku Utara*. Dalam *Basis*, No. 11-12, Tahun ke-49.
- Umarama, S., & S. (2024). Political Contribution of the Sultanate of Ternate to Regional Government in North Maluku Province 1999-2023. *International Journal of Science and Society*, 6(3), 1140-1155. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i3.1221>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Uphoff, N. (1995). Why NGOs are not a Third Sector: A Sectoral Analysis with Some Thoughts on Accountability, Sustainability, and Evaluation. In M. Edwards & D. Hulme (Eds.), *Non-Governmental Organisations – Performance and Accountability: Beyond the Magic Bullet* (pp. 23-39). Earthscan.
- Van Klinken, G. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. Routledge.
- Wahyuningtyas, A., Ramadhan, M., Suprihono, M., & Putranto, A. (2025). Efektivitas Strategi Kampanye Pasangan Sherly Laos-Sarbin Sehe di Pilgub Maluku Utara: Kajian Media, Taktik, dan Mobilisasi Massa. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.35870/jimik.v6i1.1291>
- Warwick, D. P. (1987). The Puzzling Politics of Primacy. In D. P. Warwick, *The Politics of Prevention* (pp. 11-46). Temple University Press.

- Wilson, C. (2008). *Ethno-religious violence in Indonesia: From soil to God*. Routledge.
- World Bank. (2020). *Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program*. Washington, DC: World Bank.
- Ziegenhain, P. (2008). *The Indonesian Parliament and Democratization*. Institute of Southeast Asian Studies.

PROFIL PENULIS

Dr. Jusan Hi. Yusuf, M.Si



Jusan Hi Yusuf dilahirkan di Maluku Utara, 8 Agustus 1966. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Ngofagiat Makian 1980. SMP Negeri 1 Ternate 1983, dan SPG Negeri 44 Ternate 1986. Menamatkan S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PPKn 1991. Menamatkan S2 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2001. Menamatkan S3 di Universitas Dipanegoro Semarang, Program Studi Ilmu Sosial pada 2022. Sejak tahun 1992 mengajar di Fakultas Ilmu Budaya. Pernah menjabat Ketua Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP (1994-1998). Wakil Dekan III FKIP (2001-2004). Wakil Dekan III dua Periode pada Fakultas Sastra Budaya (2004-2012) sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun.

Dr. Rustam Hasim, M.Hum



Rustam Hasim dilahirkan di Peleri, Makian Pulau, 4 Maret 1980. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Matui Kecamatan Jailolo 1992. Madrasah Tsanawiyah Negeri Ternate 1995, dan SMA 5 Ternate 1998. Menamatkan S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PKn 2002. Menamatkan S2 di Jurusan Ilmu Sejarah UGM Yogyakarta, 2006, dan Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa (UST), jurusan Manajemen Pendidikan (MP) pada tahun 2012. Menamatkan S3 di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Jurusan Ilmu Sejarah pada 2017. Sejak tahun 2005 mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PKn. Sekarang menjabat Ketua Program Studi Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Wakil Ketua Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Provinsi Cabang Maluku Utara (2023-2027). Wakil Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Maluku Utara (2022-2027). Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda (WTB) Provinsi Maluku Utara (2020-2025). Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba

(GANNAS ANNAR) MUI Provinsi Maluku Utara, (2022-2027). Karya yang pernah dipublikasikan adalah, “Dari Cengkeh ke Kerang Mutiara: Perdagangan di Karesidenan Ternate, 1854- 1930” (Lepkhair, 2013). Manajemen Sumberdaya Manusia Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Kota Ternate, (Lepkhair, 2017), Sultan dalam Sejarah Politik Ternate 1945-2002 (Lepkhair, 2018). Pergolakan Politik Pasca Kemerdekaan hingga Pembentukan Provinsi Maluku Utara, (Litnus, 2024, dan Titik Nadir Kebudayaan Negeri Rempah, (Litnus, 2024). Selain itu aktif menulis artikel di beberapa media massa yang telah dipublikasikan baik nasional maupun internasional dan beberapa surat kabar lokal.

PROFIL EDITOR

Dr. Irwan Abbas, M.Hum.



Irwan Abbas, merupakan Dosen Strata 1 pada Program Studi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Jurusan IPS, Pengajar PPG, dan Dosen Strata 2 Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate. Menyelesaikan S1 pada jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tamat tahun 1996, kemudian melanjutkan studi S2 pada jurusan Ilmu Sejarah Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tamat 2001. Pendidikan S3 pada jurusan Social Studies (IPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tamat 2014.

Penulis aktif memberikan ceramah dan seminar pada berbagai pertemuan ilmiah baik lokal, nasional, maupun internasional. Menjadi pengurus dan anggota pada beberapa organisasi keahlian/profesi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Penulis tinggal di Ternate dan bisa dihubungi pada email: irwanabbas@gmail.com.

DINAMIKA POLITIK LOKAL PASCA PILGUB MALUKU UTARA 1999

*Sebuah Pendekatan Historik,
Konflik, dan Transformasi Kekuasaan*

Buku *Dinamika Politik Lokal Pasca Pilgub Maluku Utara 1999* mengkaji secara komprehensif perjalanan politik Maluku Utara sejak terbentuk sebagai provinsi baru hingga memasuki fase demokrasi lokal yang semakin kompleks. Berangkat dari konteks Reformasi 1998 dan pemilihan gubernur pertama tahun 1999, buku ini menelusuri bagaimana proses pemekaran, konflik sosial, serta tarik ulur kepentingan elite membentuk fondasi politik daerah. Pilgub 1999 tidak hanya dipotret sebagai peristiwa elektoral, tetapi sebagai titik balik sejarah yang memunculkan dualisme kepemimpinan, krisis legitimasi, serta intervensi pusat dalam dinamika hubungan Jakarta dan daerah.

Selanjutnya, buku ini menguraikan keterkaitan antara konflik sosial, politik identitas, dan peran struktur tradisional seperti Kesultanan dalam kontestasi kekuasaan modern. Eksistensi Moloku Kie Raha, polarisasi etnis, serta politisasi agama menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana demokrasi lokal tumbuh di tengah trauma kerusuhan 1999. Transformasi elite politik, menguatnya patronase, perebutan sumber daya tambang, hingga pertarungan geopolitik antara wilayah kepulauan dan daratan Halmahera menunjukkan bahwa politik lokal tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, budaya, dan geografis yang khas.

Lebih jauh, buku ini membahas perkembangan pilkada langsung, dinamika DPRD, birokrasi, korupsi, peran media, gerakan mahasiswa, serta partisipasi perempuan dalam arena politik daerah. Isu otonomi khusus, hubungan pusat-daerah, pembangunan infrastruktur, hingga tantangan globalisasi dan digitalisasi turut dianalisis sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Pada akhirnya, refleksi 25 tahun pasca Pilgub 1999 mengantarkan pembaca pada evaluasi kritis mengenai capaian dan kegagalan otonomi daerah, sekaligus menawarkan visi masa depan politik Maluku Utara menuju demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
 0815-7000-699



SCANME

Humaniora

ISBN 978-634-246-763-3



9

786342

467633